

BAB V

KESIMPULAN

Kesimpulan akhir dari penulisan skripsi ini adalah kebijakan pemerintah Myanmar yang terkesan ambigu dalam menyelesaikan konflik Rohingya. Pemerintah Myanmar cenderung memihak kelompok mayoritas Burma yang beragama Budha. Selain itu, adanya tuntutan yang masuk dari internal sistem yang menginginkan adanya pembersihan etnis dan eksternal sistem yang mendorong pemerintah untuk mengakui kewarganegaraan Rohingya, membuat pemerintah Myanmar berlaku tidak tegas dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

Myanmar merupakan Negara dengan beragam etnis yang mayoritas penduduknya beragama Budha. Budha di Myanmar mencapai 2/3 dari jumlah penduduk. Tidak dapat dipungkiri jika Budha sangat berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah Myanmar. Bahkan partai berkuasa pimpinan Thein sein didominasi oleh orang-orang Budha. Hal inilah yang tentunya menyebabkan pemerintah lebih memihak masyarakat Budha dibandingkan mengakomodir kepentingan etnis Rohingya yang populasinya lebih kecil. Pemerintah tentu membutuhkan dukungan dari rakyat Burma dalam tindak tanduknya agar posisinya aman dan masyarakat tidak resisten terhadap pemerintah.

Konflik antar etnis yang telah berlangsung selama puluhan tahun di Arakan ini dapat dikatakan sebagai bentuk representasi dominasi kelompok

mayoritas terhadap minoritas, yaitu muslim Rohingya yang tertindas sejak tahun 1942 baik oleh masyarakat Budha maupun pemerintah.

Muslim Rohingya merupakan komunitas yang terasing, baik karena kondisi geografi yang terisolir maupun kebijakan pemerintah pusat yang sengaja mengasingkan diri dari dunia internasional. Hal ini dapat disebabkan oleh karena pengaruh perbedaan rasa atau kebudayaan yang kemudian menimbulkan prasangka-prasangka. Muslim rohingya merupakan muslim keturunan Bengal yang kemudian keturunan-keturunannya atau penerusnya menetap dan menjadi warga Arakan. Namun, walaupun mereka telah bergenerasi-generasi tinggal di Arakan, muslim Rohingya tetap dianggap sebagai masyarakat asing yang datang dari negeri Bangladesh sebagai imigran illegal sehingga mereka mengalami ketidakadilan atas agama, suku, dan posisi mereka sebagai kelompok minoritas.

Keterasingan ini mengakibatkan putusnya komunikasi dengan dunia luar serta sulitnya mengadakan interaksi social. Begitu pula yang terjadi dengan muslim Rohingya, selama puluhan tahun tertindas mereka tidak dapat mengkomunikasikan apa yang mereka alami kepada masyarakat luas sehingga kejadian yang tak berkeprimanusiaan itu pada umumnya tidak mendapat perhatian dari dunia luar.

Dalam perjalanannya, muslim Rohingya harus berjuang sendiri tanpa bantuan luar negeri untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga Negara Myanmar. Sejak Burma merdeka, sampai Ne win tidak lagi menjadi pemimpin

Burma, tuntutan muslim Rohingya hanya tinggal tuntutan. Sekedar keinginan yang tidak pernah terpenuhi. Mereka ditindas oleh junta militer yang berkuasa di Burma. Hal tersebut terbukti pada 31 Januari 2013, diperkirakan ada 78 warga etnis Rohingya di Thailand, sedangkan 193 orang etnis Rohingya mendarat di Aceh. Mereka terpaksa meninggalkan negaranya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, karena selama ini di Myanmar mereka sangat sulit memperoleh pekerjaan. Mereka mengaku tidak ingin kembali ke Negara asal mereka. Sampai saat ini, perjuangan muslim Rohingya untuk memenuhi tuntutannya tidak pernah berhasil. Tuntutan tersebut tidak pernah mencapai titik hasil yang signifikan.

Seharusnya, sebagai komunitas yang sudah lama menetap di Arakan, bagian dari Negara Myanmar, tentu sudah selayaknya mereka mendapatkan hak-hak dasar mereka. Tetutama status kewarganegaraan. Meskipun demikian, pemerintah dengan tegas tidak akan mungkin memberikan status kewarganegaan kepada Rohingya. Bahkan Presiden Myanmar, Thein Sein pada tanggal 29 Juli 2012, mengatakan tidak akan memberikan status kewarganegaraan kepada kelompok Rohingya karena mereka merupakan imigran gelap dan pelintas batas dari Bangladesh. Hal inilah yang memicu terjadinya konflik antar etnis yang memposisikan etnis Rohingya sebagai target utama untuk disingkirkan.

Pada bulan Juni 2012 terjadi peristiwa konflik komunal yang dipicu oleh isu adanya pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pemuda etnis Rohingya terhadap gadis etnis Rakhine. Isu tersebut kemudian berkembang

menjadi konflik komunal antar kedua etnis yang memang sudah lama terpendam permusuhan dan kebencian serta kebijakan marginalisasi oleh rezim pemerintah militer. Berlangsungnya konflik yang antar etnis yang berlarut-larut ini telah menumbuhkan sikap kebencian dan permusuhan yang begitu mengakar oleh etnis Burma terhadap etnis Rohingya yang dianggap berbeda oleh kelompok mayoritas. Kondisi ini diperparah oleh sikap pemerintah yang mendukung dan memelihara terjadinya konflik tersebut.

Maka, dari pemaparan diatas dapat dilihat selain tekanan yang dilakukan oleh pemerintah, muslim Rohingya juga mendapat tekanan dari masyarakat mayoritas Budha. Sekelompok biksu mengeluarkan selebaran berisi peringatan kepada warga Myanmar untuk tidak bergaul dengan muslim Rohingya. Sementara selebaran lainnya berisi rencana untuk memusnahkan kelompok etnis lain di Myanmar.

Tindakan diskriminatif yang menimpa muslim Rohingya menjadi konflik horizontal antar agama. konflik ini semakin memanas ketika para tokoh pemuka agama ikut melakukan intervensi. Ada dua organisasi biksu terbesar di Myanmar, asosiasi biksu muda sittwe dan asosiasi biksu Mrauk Oo yang menyerukan agar warga Myanmar tidak berhubungan dengan muslim Rohingya. Kelompok etnis mayoritas Burma yang mengendalikan pengaruhnya terhadap etnis-etnis lainnya mengemukakan bahwa muslim Rohingya bukanlah kelompok etnis Burma. Atas alasan inilah yang menjadi legitimasi tindakan kebrutalan dan kesewenang-wenangan terhadap etnis Rohingya yang mengarah pada upaya penghapusan etnis Rohingya dari

Myanmar. Dengan minimnya media yang independen, informasi yang akurat , dan berimbang, ekstrimis di Rakhine sangat leluasa untuk dilakukan tanpa diketahui oleh publik.

Namun, seiring maraknya isu demokratisasi dan berakhirnya rezim junta militer persoalan Rohingya secara perlahan-lahan mulai mencuatnya dalam skala global, maka dukungan masyarakat Internasional termasuk PBB semakin kuat menyuarakan ketidakadilan dan pelanggaran HAM yang selama ini dialami oleh etnis Rohingya. Desakan masyarakat internasional terhadap pemerintah Myanmar untuk segera mengambil solusi konstruktif mendorong pemerintah Myanmar untuk mengakui kewarganegaraan Rohingya. Selain itu, masyarakat internasional juga mendesak pemerintah Myanmar untuk menghentikan segala bentuk tindak pelanggaran Ham dan kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya.